



Bab 5 **KERANGKA STRATEGI** **PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR** **BIDANG CIPTA KARYA**

Di bab ini akan menjelaskan terkait Potensi Pendanaan APBD, Profil Investasi Bidang Cipta Karya, Proyeksi Rencana Investasi Bidang Cipta Karya, Analisis Keterpaduan Strategi Peningkatan Investasi Pembangunan, Alternatif Sumber Pendanaan, serta Strategi Pendanaan Investasi Infrastruktur

5.1 POTENSI PENDANAAN APBD

5.1.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Pembangunan

Pembiayaan pembangunan bidang Cipta Karya perlu memperhatikan arahan dalam peraturan dan perundangan terkait, antara lain:

A. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diberikan hak otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

B. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah didukung sumber-sumber pendanaan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Lain yang Sah, serta Penerimaan Pembiayaan.



Penerimaan daerah ini akan digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

C. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus. Pembagian DAU dan DBH ditentukan melalui rumus yang ditentukan Kementerian Keuangan. Sedangkan DAK digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional. Penentuan lokasi dan besaran DAK dilakukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

D. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi 26 urusan, termasuk bidang pekerjaan umum. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan wajib pemerintahan yang merupakan urusan bersama diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan

E. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

Sumber pinjaman daerah meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, serta Masyarakat. Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, tetapi diteruskan melalui pemerintah pusat. Dalam melakukan pinjaman daerah Pemda wajib memenuhi persyaratan:

- 1) Total jumlah pinjaman pemerintah daerah tidak lebih dari 75% penerimaan APBD tahun sebelumnya;
- 2) Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan pemerintah paling sedikit 2,5;



- c. Persyaratan lain yang ditetapkan calon pemberi pinjaman;
- d. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah;
- e. Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

F. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (dengan perubahan Perpres 13/2010 & Perpres 56/2010)

Menteri atau Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Jenis infrastruktur permukiman yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha adalah infrastruktur air minum, infrastruktur air limbah permukiman dan prasarana persampahan.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (dengan perubahan Permendagri 59/2007 dan Permendagri 21/2011)

Struktur APBD terdiri dari:

- a. Pendapatan daerah yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah,
- b. Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain yang Sah.
- c. Belanja Daerah meliputi: Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
- d. Pembiayaan Daerah meliputi: Pembiayaan Penerimaan dan
- e. Pembiayaan Pengeluaran.

F. Peraturan Menteri PU No. 15 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur

Kementerian PU menyalurkan DAK untuk pencapaian sasaran nasional bidang Cipta Karya, Adapun ruang lingkup dan kriteria teknis DAK bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut:

1) Bidang Infrastruktur Air Minum

DAK Air Minum digunakan untuk memberikan akses pelayanan sistem penyediaan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh perkotaan dan

di perdesaan termasuk daerah pesisir dan permukiman nelayan. Adapun kriteria teknis alokasi DAK diutamakan untuk program percepatan



pengentasan kemiskinan dan memenuhi sasaran/target Millenium Development Goals (MDGs) yang mempertimbangkan:

- Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah;
- Tingkat kerawanan air minum.

2) Bidang Infrastruktur Sanitasi

DAK Sanitasi digunakan untuk memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) yang layak skala kawasan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan yang diselenggarakan melalui proses pemberdayaan masyarakat. DAK Sanitasi diutamakan untuk program peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memenuhi sasaran/target MDGs yang dengan kriteria teknis:

- Kerawanan sanitasi;
- Cakupan pelayanan sanitasi.

G. Peraturan Menteri PU No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri

Dalam menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dana APBN, Kementerian PU membentuk satuan kerja berupa Satker Tetap Pusat, Satker Unit Pelaksana Teknis Pusat, dan Satuan Non Vertikal Tertentu. Rencana program dan usulan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Kerja harus mengacu pada RPI2-JM bidang infrastruktur ke-PU-an yang telah disepakati. Gubernur sebagai wakil Pemerintah mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kementerian yang dilaksanakan di daerah dalam rangka keterpaduan pembangunan wilayah dan pengembangan lintas sektor.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkup sumber dana kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya yang dibahas dalam RPI2-JM bidang Cipta Karya meliputi:

- 1) Dana **APBN**, meliputi dana yang dilimpahkan Ditjen Cipta Karya kepada Satuan Kerja di tingkat provinsi (dana sektoral di daerah)
- 2) serta Dana Alokasi Khusus bidang Air Minum dan Sanitasi.
- 3) Dana **APBD Provinsi**, meliputi dana **daerah untuk urusan bersama (DDUB)** dan dana lainnya yang dibelanjakan pemerintah provinsi untuk pembangunan infrastruktur permukiman dengan skala provinsi/regional.



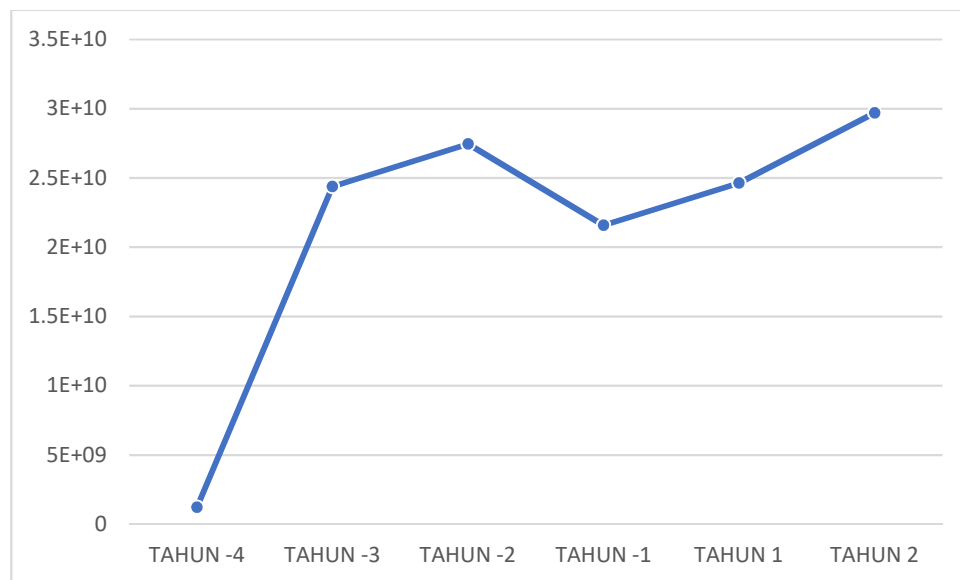
- 4) Dana **APBD Kabupaten/Kota**, meliputi dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) dan dana lainnya yang dibelanjakan pemerintah kabupaten untuk pembangunan infrastruktur permukiman dengan skala kabupaten/kota.
- 5) Dana **Swasta** meliputi dana yang berasal dari skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), maupun skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- 6) Dana **Masyarakat** melalui program pemberdayaan masyarakat.
- 7) Dana **Pinjaman**, meliputi pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.
- 8) Dana-dana tersebut digunakan untuk belanja pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana yang telah terbangun, serta rehabilitasi dan peningkatan prasarana yang telah ada. Oleh karena itu, dana-dana tersebut perlu dikelola dan direncanakan secara terpadu sehingga optimal dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan pelayanan bidang Cipta Karya.



5.2 PROFIL INVESTASI BIDANG CIPTA KARYA

5.2.1 Perkembangan Investasi Pembangunan Infrastruktur Bersumber dari APBN dalam 5 Tahun Terakhir

Bagian ini berisikan potensi pendanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya pada APBD Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 5.1

Grafik Peningkatan Pendanaan APBD
Sumber : Hasil Analisa, 2018



Tabel 5.1 Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya Kota Palangkaraya

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
pengembangan kawasan permukiman	Program pengembangan perumahan	Rp1,222	Rp1,500	Rp1,800	Rp2,500	Rp3,000	Rp10,022	Rp0	Rp0	Rp0
	Program pembangunan lingkungan sehat perumahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Program pengembangan perumahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengembangan penataan lingkungan permukiman, pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Memperjelas status lahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembatasan dan mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Revitalisasi kawasan permukiman kumuh	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Menyiapkan dukungan infrastruktur permukiman	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Program pengembangan perumahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengembangan penataan lingkungan permukiman, pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur penunjang permukiman	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembatasan dan mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Revitalisasi kawasan permukiman kumuh	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembatasan dan mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Menyiapkan dukungan infrastruktur permukiman	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50	Rp50	Rp0	Rp0	Rp0
	Sosialisasi, Survey dan pendataan Kelurahan Langkai RW VIII dan RW XVII	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200	Rp0
	Sosialisasi, Survey dan pendataan Kelurahan Langkai RW II, Kelurahan Pahandut RW XIV, RW XVII, RW XII	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp420	Rp2,500	Rp3,220	Rp1,240	Rp0
	Proses Ganti Rugi RW VIII dan RW XVII	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Proses Ganti Rugi RW II, Kelurahan Pahandut RW XIV, RW XVII, RW XII	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2	Rp12,500	Rp16,100	Rp6,200



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Pelaksanaan Konstruksi Kelurahan Langkai RW VIII dan RXXVII	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pelaksanaan Konstruksi RW II, Kelurahan Pahandut RW XIV, RW XVII, RW XII	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84	Rp500	Rp644	Rp248
	Proses Pembongkaran Perumahan Eksisting	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150	Rp0
	Penyiapan Hunian Sementara	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peremajaan Hunian	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyiapan Hunian Nelayan Sementara	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peremajaan Nelayan Hunian	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman baru sesuai kebutuhan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Perbaikan kualitas perumahan dengan renovasi dan rehabilitasi rumah kampung	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
penataan bangunan dan lingkungan	Pengembangan dan penataan sistem sanitasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembatasan dan mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Memperjelas status lahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
pengembangan PLP	Mengembangkan permukiman layak huni dengan sistem sanitasi terpadu	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peningkatan Kinerja/Pemb PS Drainase Primer	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan jaringan drainase primer	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Drainase	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peningkatan turap,talut drainase sekunder	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Mengembangkan permukiman ramah lingkungan sinergis dengan sistem drainase	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait kebersihan lingkungan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengembangan program 3R (reuse, recycle, reduce)	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Ditetapkannya Perda Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Dipisahkannya fungsi operator dan regulator dalam pengelolaan sampah serta Terbentuknya Dewan Pengelolaan Persampahan Perkotaan.	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengembangan inovasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pelaksanaan pemilahan sampah di dalam kawasan atau tempat penampungan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengolahan sampah organik dan pembangunan unit-unit daur ulang	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengembangan home composting di masyarakat	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peningkatan pengelolaan air limbah bersama	Rp0	Rp303	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Mengelola air limbah secara terintegrasi, dioperasikan secara berkelanjutan, dengan bertumpu kepada kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.	Rp0	Rp5,775	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah diusahakan dengan system terpusat dan menggunakan prinsip pemulihan biaya, dengan prioritas pelayanan pada kawasan hunian dengan kepadatan bangunan	Rp0	Rp600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Meningkatnya partisipasi warga dalam pembangunan dan pengelolaan IPAL rumah tangga	Rp0	Rp275	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Mendorong masyarakat agar memiliki fasilitas pembuangan limbah	Rp0	Rp5,250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Kajian regulasi perda pembentukan perusahaan daerah pengelola persampahan skala kota palangka raya	Rp0	Rp237	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	konsultasi publik hasil regulasi perda pembentukan perusahaan daerah pengelola persampahan skala kota palangkaraya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	pembahasan raperda tentang pembentukan perusahaan daerah pengelola persampahan skala kota palangkaraya	Rp0	Rp2,865	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	sosialisasi publik regulasi PERWALI pembentukan perusahaan daerah	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	pengelola persampahan skala kota palangkaraya									
	Penyusunan formulasi Standard Operating System (SOP) Sistem manajemen persampahan perusahaan daerah pengelola persampahan skala kota palangkaraya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Evaluasi efektivitas penerapan PERWALI sistem manajemen persampahan Bank sampah masyarakat lingup RT/RW, kelurahan, kecamatan dan skala kawasan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,500	Rp0	Rp0	Rp0
	Pelatihan karyawan dalam pengelolaan TPA Kota Palangkaraya	Rp0	Rp0	Rp60	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong.	Rp0	Rp0	Rp50	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Kota.	Rp0	Rp0	Rp10	Rp10	Rp10	Rp10	Rp0	Rp0	Rp0
	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong.	Rp0	Rp0	Rp400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Kegiatan: Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.	Rp0	Rp0	Rp400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Program Perencanaan Teknis.	Rp0	Rp0	Rp400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Kegiatan: Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Drainase dan Irigasi	Rp0	Rp0	Rp936	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembuatan masterplan air limbah	Rp0	Rp0	Rp400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan IPAL Kel. Kameloh Baru, Kel. Danau Tundai, Kel. Petuk Barunai, Kel. Kalampangan, Kel. Tangkiling, Kel. Pahandut	Rp0	Rp0	Rp50	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan IPAL Kel. Bukit tunggal, Kel. Pahandut Seberang, Kel. Palangka, Kel. Menteng	Rp0	Rp0	Rp50	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan IPAL Kel. Panarung, Kel. Langkai, Kel. Tumbang Rungan	Rp0	Rp0	Rp4	Rp4	Rp4	Rp4	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan IPAL Kel. Tanjung Pinang, Kel. Danau Tundai, Kel. Bereng Bengkel	Rp0	Rp121	Rp122	Rp140	Rp160	Rp200	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah	Rp0	Rp121	Rp35	Rp40	Rp60	Rp80	Rp0	Rp0	Rp0
	Belanja perencanaan pembangunan toilet umum	Rp0	Rp0	Rp25	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Sosialisasi / rapat koordinasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Wisata Sei Gohong	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Wisata Sebangau	Rp0	Rp36	Rp40	Rp44	Rp49	Rp53	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Wisata Danau	Rp0	Rp0	Rp200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Toilet Umum di Kawasan TPU Km. 12	Rp0	#VALUE!	Rp144	Rp270	Rp540	Rp630	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Terminal Antar Kota	Rp0	Rp741	Rp750	Rp760	Rp700	Rp780	Rp0	Rp0	Rp0
	Belanja pengawasan pembangunan toilet umum	Rp0	Rp25	Rp60	Rp80	Rp100	Rp120	Rp0	Rp0	Rp0
	Pemeliharaan jaringan sanitasi	Rp0	Rp26	Rp35	Rp45	Rp500	Rp55	Rp0	Rp0	Rp0
	Honorarium petugas pelaporan e-monitoring DAK	Rp0	Rp34	Rp38	Rp42	Rp46	Rp51	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengelolaan IPLT	Rp0	#VALUE!	Rp160	Rp120	Rp40	Rp40	Rp0	Rp0	Rp0
	Sosialisasi air limbah	Rp0	Rp102	Rp200	Rp250	Rp300	Rp350	Rp0	Rp0	Rp0
	Sosialisasi penyiapan lahan kel. Pahandut seberang	Rp0	Rp0	Rp1,500	Rp1,200	Rp1,200	Rp600	Rp0	Rp0	Rp0
	sosialisasi penyiapan lahan kel. Menteng	Rp0	Rp900	Rp3,000	Rp700	Rp900	#VALUE!	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/ Cair yang menimbulkan polusi Kel. Tangkiling, Kel. Pahandut, Kel. Kalampangan, Kel. Menteng	Rp0	#VALUE!	Rp200	Rp700	Rp900	Rp900	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyusunan perda pengelolaan air limbah domestik	Rp0	Rp0	Rp350	Rp0	Rp0	Rp350	Rp0	Rp0	Rp0
	Pelaksanaan STUDI EHRA	Rp0	#VALUE!	Rp240	Rp240	Rp240	Rp240	Rp0	Rp0	Rp0
	a. Pengadaan Angkutan Roda 3 untuk pasukan pembantu tim penyapuan	Rp0	Rp0	Rp2,000	#VALUE!	#VALUE!	Rp300	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	b. Pengelolaan kebersihan lingkungan	Rp0	Rp0	Rp600	Rp300	Rp300	Rp300	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan Tong/bak Sampah	Rp0	Rp3,500	Rp6,000	Rp6,500	Rp7,500	Rp9,000	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyelenggaraan penyuluh kebersihan lingkungan	Rp0	Rp378	Rp700	Rp800	Rp900	Rp1,000	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp0	Rp0	Rp500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Rehab TPS di wilayah UPT PST	Rp0	Rp0	Rp1,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Landasan container	Rp0	Rp0	Rp350	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	a. Pembelian lahan untuk transfer depo	Rp0	Rp49	Rp100	Rp110	Rp120	Rp130	Rp0	Rp0	Rp0
	b. Supervisi dan Pembangunan (TPS Transfer Depo)	Rp0	Rp0	Rp300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	c. Pemeliharaan TPS (Transfer Depo)	Rp0	Rp0	Rp450	Rp500	Rp500	Rp500	Rp0	Rp0	Rp0
	a. Pengadaan mobil operasional Lapangan	Rp0	Rp0	Rp600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	b. Pengadaan pickup angkutan sampah	Rp0	Rp0	Rp100	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Rp0	Rp0	Rp0
	c. Pengadaan Truk Container/ Arm Roll	Rp0	Rp40	Rp70	Rp100	Rp120	Rp150	Rp0	Rp0	Rp0
	d. Pengadaan dump truk	Rp0	Rp25	Rp165	Rp170	Rp180	Rp200	Rp0	Rp0	Rp0
	e. Pengelolaan pengangkutan sampah	Rp0	Rp221	Rp250	Rp250	Rp250	Rp250	Rp0	Rp0	Rp0
	f. Pemeliharaan rutin/ berkala operasional kebersihan dan angkutan sampah	Rp0	Rp0	Rp150	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	a. Pembangunan pos keluar masuk area pool truk	Rp0	Rp0	Rp250	Rp250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	b. Pembangunan pagar area pool truk	Rp0	Rp395	Rp500	Rp550	Rp600	Rp650	Rp0	Rp0	Rp0
	c. Pembangunan gudang perlengkapan dan peralatan bengkel/ workshop	Rp0	Rp35	Rp40	Rp50	Rp60	Rp70	Rp0	Rp0	Rp0
	d. Pengadaan peralatan bengkel workshoop	Rp0	Rp0	Rp200	Rp350	Rp500	Rp500	Rp0	Rp0	Rp0
	e. Pengadaan kendaraan operasional mekanik	Rp0	Rp39	Rp43	Rp47	Rp52	Rp57	Rp0	Rp0	Rp0
	f. Peningkatan fasilitas di Pool Truk	Rp0	Rp0	Rp240	Rp240	Rp250	Rp250	Rp0	Rp0	Rp0
	g. Pengadaan sistem informasi kontrol dan alat komunikasi truk angkutan sampah	Rp0	Rp40	Rp210	Rp220	Rp230	Rp240	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembelian peralatan dan perlengkapan pembuat kompos	Rp0	Rp0	Rp80	Rp90	Rp100	Rp110	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengawasan dan pengendalian persampahan (supervising)	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Sosialisasi mengenai pengelolaan persampahan di wilayah UPT	Rp0	Rp1,400	Rp2,500	Rp3,000	Rp4,200	Rp4,800	Rp0	Rp0	Rp0
	a. Rehab jalan landfill TPA	Rp0	Rp450	Rp750	Rp1,200	Rp1,400	Rp1,600	Rp0	Rp0	Rp0
	b. Rehab pos jaga TPA	Rp0	Rp1,500	Rp2,500	Rp3,000	Rp4,200	Rp5,600	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan mobil operasional TPA (pickup)	Rp0	Rp300	Rp500	Rp1,800	Rp2,100	Rp3,200	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengolahan sampah TPA	Rp0	Rp700	Rp500	Rp900	Rp1,400	Rp1,600	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Pengawasan dan pengendalian IPLT dan TPA	Rp0	Rp575	Rp500	Rp1,200	Rp1,400	Rp1,600	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengembangan Bank Sampah	Rp0	Rp1,250	Rp1,500	Rp2,400	Rp4,200	Rp4,000	Rp0	Rp0	Rp0
	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah	Rp0	Rp150	Rp250	Rp900	Rp1,050	Rp400	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyelenggaraan lomba kampung Hijau dan bersih tingkat UPT-PST	Rp0	Rp310	Rp1,000	Rp1,000	Rp1,000	Rp1,000	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyelenggaraan lomba 3R di Tingkat UPT-PST (7 UPT-PST)	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyelenggaraan Lomba Kampung Hijau dan Bersih Tingkat Kota Palangka Raya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong Gorong	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200
	DED IPAL Kawasan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan IPAL	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Pipa dan SR	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Percontohan IPAL rumah Panggung	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp350	Rp0
	Percontohan IPAL rumah terapung	Rp0	Rp25	Rp25	Rp30	Rp30	Rp35	Rp0	Rp0	Rp0
	Sosialisasi Air Limbah	Rp0	Rp50	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyusunan Peraturan Daerah	Rp0	Rp557	Rp0	Rp550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan WC Mobile	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600	Rp300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Air Tinja	Rp0	Rp40	Rp40	Rp50	Rp50	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Pengawasan dan Pengendalian Air Limbah	Rp0	Rp1,200	Rp2,100	Rp2,100	Rp3,640	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Tangki Septik Komunal	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100	Rp150	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan MCK	Rp0	Rp117	Rp131	Rp0	Rp300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pendataan sanitasi Masyarakat	Rp0	Rp1,000	Rp1,000	Rp1,000	Rp1,000	Rp500	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan IPAL Terpusat skala Kawasan	Rp0	Rp6,000	Rp6,350	Rp7,000	Rp8,022	Rp8,750	Rp0	Rp0	Rp0
	Operasional Angkutan Sampah	Rp0	Rp0	Rp350	Rp400	Rp500	Rp600	Rp0	Rp0	Rp0
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPS dan Kontainer	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,681	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan Truck Compector/Pres Sampah	Rp0	Rp2,400	Rp1,200	Rp1,500	Rp1,800	Rp2,000	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan transer depo sampah	Rp0	Rp50	Rp60	Rp100	Rp70	Rp80	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan tong sampah	Rp0	Rp40	Rp50	Rp125	Rp50	Rp100	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan Gerobak sampah	Rp0	Rp40	Rp40	Rp60	Rp60	Rp70	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyuluhan Kebersihan	Rp0	Rp40	Rp40	Rp50	Rp50	Rp60	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengawasan dan Penedalihan kebersihan	Rp0	Rp27	Rp30	Rp32	Rp34	Rp35	Rp0	Rp0	Rp0
	Sosialisasi 3R	Rp0	Rp0	Rp60	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah/Kebersihan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40	Rp40	Rp50	Rp0	Rp0	Rp0
	Penegakan Perda Pengelolaan Sampah dan Kebersihan/Sanksi	Rp0	Rp200	Rp226	Rp200	Rp200	Rp200	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Pelaksanaan Pengadaan tanah	Rp0	Rp2	Rp3	Rp5	Rp5	Rp6	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyerahan tanah	Rp0	Rp0	Rp20	Rp20	Rp20	Rp20	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembuatan landasan kontainer	Rp0	Rp0	Rp950	Rp950	Rp0	Rp950	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan Truck Arm ROLL	Rp0	Rp0	Rp1,350	Rp1,360	Rp1,370	Rp1,380	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan Dump Truck	Rp0	Rp246	Rp0	Rp800	Rp200	Rp400	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan Kontainer	Rp0	Rp350	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Penyusunan master plan pengelolaan persampahan Kota Palangka Raya	Rp0	Rp2,650	Rp2,700	Rp2,800	Rp2,900	Rp3,000	Rp0	Rp0	Rp0
	Operasional Kebersihan lingkungan	Rp0	Rp0	Rp1,850	Rp0	Rp0	Rp2,500	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan Road Sweeper/Mobil Penyapu Jalan	Rp0	Rp30	Rp30	Rp50	Rp50	Rp50	Rp0	Rp0	Rp0
	Operasional TPST	Rp0	Rp0	Rp2,000	Rp2,000	Rp0	Rp2,000	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan TPST	Rp0	Rp0	Rp25	Rp0	Rp0	Rp30	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembentukan UKM dan Posdaya masyarakat peduli sampah	Rp0	Rp800	Rp900	Rp1,100	Rp1,300	Rp1,300	Rp0	Rp0	Rp0
	Operasional TPA	Rp0	Rp300	Rp350	Rp400	Rp500	Rp600	Rp0	Rp0	Rp0
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA	Rp0	Rp0	Rp363	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembuatan Pagar Batas TPA tahap III	Rp0	Rp750	Rp0	Rp0	Rp700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Peningkatan jalan lingkungan TPA	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Pengadaan Mesin Pencacah sampah	Rp0	Rp25	Rp30	Rp40	Rp45	Rp46	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	Rp0	Rp0	Rp750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pengadaan incenerator	Rp0	Rp100	Rp100	Rp125	Rp150	Rp150	Rp0	Rp0	Rp0
	Pemanfaatan Gas Metan TPA	Rp0	Rp0	Rp750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Jembatan Timbang	Rp0	Rp50	Rp50	Rp50	Rp50	Rp50	Rp0	Rp0	Rp0
	Operasional Kajian Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Rp0	Rp1,400	Rp2,500	Rp3,000	Rp4,200	Rp4,800	Rp0	Rp0	Rp0
	Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong Gorong	Rp0	Rp450	Rp750	Rp1,200	Rp1,400	Rp1,600	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong (DAU)Kel. Pahandut	Rp0	Rp1,500	Rp2,500	Rp3,000	Rp4,200	Rp5,600	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong (DAU)Kel. Menteng	Rp0	Rp300	Rp500	Rp1,800	Rp2,100	Rp3,200	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong (DAU)Kel. Langkai	Rp0	Rp700	Rp500	Rp900	Rp1,400	Rp1,600	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong (DAU)Kel. Palangka	Rp0	Rp575	Rp500	Rp1,200	Rp1,400	Rp1,600	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong (DAU)Kel. Kereng	Rp0	Rp1,250	Rp1,500	Rp2,400	Rp4,200	Rp4,000	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong (DAU)Kel. Bukit Tunggal	Rp0	Rp150	Rp250	Rp900	Rp1,050	Rp400	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong (DAU)Kel. Petuk Ketimpun	Rp0	Rp310	Rp1,000	Rp1,000	Rp1,000	Rp1,000	Rp0	Rp0	Rp0
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong Gorong	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80	Rp90	Rp0	Rp0	Rp0
pengembangan SPAM	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kel. Mungku Baru	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70	Rp0	Rp90	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Bukit Sua	Rp0	Rp0	Rp60	Rp0	Rp80	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Panjehang	Rp0	Rp50	Rp0	Rp70	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Gaung Baru	Rp0	Rp50	Rp0	Rp70	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Pager	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Kanarakan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70	Rp80	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Petuk Berunai	Rp0	Rp0	Rp60	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Petuk Bukit	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Habaring Hurung	Rp0	Rp50	Rp0	Rp0	Rp80	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Marang	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70	Rp0	Rp90	Rp0	Rp0	Rp0



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

SEKTOR	Kegiatan	PROYEKSI (dalam juta)								
		TAHUN -4	TAHUN -3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Banturung	Rp0	Rp50	Rp0	Rp0	Rp80	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Petuk Katimpun	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70	Rp0	Rp90	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Rp0	Rp50	Rp60	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Pahandut Seberang	Rp0	Rp0	Rp60	Rp0	Rp0	Rp90	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Bereng Bengkel	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp90	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Kalampangan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Kereng Bangkirai	Rp0	Rp0	Rp60	Rp0	Rp80	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Tanjung Pinang	Rp0	Rp0	Rp60	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Tanjung Pinang	Rp0	Rp0	Rp60	Rp0	Rp80	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersihKel. Bukit Tunggul	Rp0	Rp40	Rp40	Rp40	Rp40	Rp40	Rp0	Rp0	Rp0
	Sosialisasi Pembinaan Kelompok Pemanfaat dan Penerima (KP2) Air Bersih	Rp0	Rp200	Rp300	Rp300	Rp300	Rp300	Rp0	Rp0	Rp0
	Pemeliharaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Rp1,222	Rp55,231	Rp72,140	Rp78,625	Rp91,657	Rp105,770	Rp16,220	Rp18,684	Rp6,648



5.2.2 Potensi Pendanaan APBN

Potensi pengembangan infrastruktur bidang cipta karya melalui APBN Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Potensi Pendanaan APBN

SEKTOR	Kegiatan	TAHUN (juta rupiah)				
		TH -3	TH -2	TH -1	TH 1	TH 2
Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan Bangunan dan lingkungan, Pengembangan SPAM, Pengembangan PLP	Pembangunan IPAL Septictank: Kel. Kameloh Baru, Kel. Danau Tundai, Kel. Petuk Barunai, Kel. Kalamangan, Kel. Tangkiling, Kel. Pahandut	2,577				
	Pembangunan IPAL Septictank: Kel. Bukit tunggal, Kl. Pahandut Seberang, Kel. Palangka, Kel. Menteng			1,800		
	Pembangunan IPAL Septictank: Kel. Panarung, Kel. Langkai, Kel. Tumbang Rungan				1,350	
	Pembangunan IPAL Septictank: Kel. Tanjung Pinang, Kel. Danau Tundai, Kel. Bereng Bengkel					1,350
	Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah IPAL Komunal (DAK Reguler)Pahandut Seberang		60			
	Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah IPAL Komunal (DAK Reguler)Kel. Kereng Bangkirai		187			
	Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Wisata Sei Gohong		400			
	Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Wisata Sebangau		400			
	Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Wisata Danau		400			
	Pembangunan Toilet Umum di Kawasan TPU Km. 12		936			
	Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Terminal Antar Kota		400			
	Penyusunan DED IPAL Kawasan Kel. Pahandut Seberang	600				
	Penyusunan DED IPAL Kawasan Kel. Menteng			600		
	Pembangunan IPAL Kawasan Kel. Pahandut Seberang		400			
	Pembangunan IPAL KawasanKel. Menteng				400	
	Pembangunan IPAL Komunal dan jaringan perpipaan Kel. Menteng			400		



SEKTOR	Kegiatan	TAHUN (juta rupiah)				
		TH -3	TH -2	TH -1	TH 1	TH 2
	Pembangunan IPAL Komunal dan jaringan perpipaan Kel. Pahandut				400	
	Pembangunan IPAL Komunal dan jaringan perpipaan Kel. Palangka					400
	Penyusunan Masterplan Persampahan		800			
	TPST 3R Kel. Jekan Raya		500			
	TPST 3R Kel. Menteng, Kel. Pahandut, Kel. Sabaru			1,500		
	TPST 3R Kel. Pahandut Seberang, Kel. Palangka, Kel. Langkai				1,500	
	TPST 3R Kel. Bukit Tunggal, Kel. Tanjung Pinang, Kel. Tangkiling					1,500
	Pembangunan Transfer Depo/ TPST SENTRA Kec. Jekan Raya, Pahandut, Sabangau, Bukit Batu			6,000	6,000	7,500

Sumber : Hasil Analisa, 2018

5.2.3 Perkembangan Investasi Pembangunan Infrastruktur Bersumber dari Perusahaan Daerah dalam 5 Tahun Terakhir

Investasi Pembangunan Infrastruktur Bersumber dari Perusahaan Daerah dalam 5 tahun terakhir di Palangka Raya belum tersedia data yang komprehensif sehingga belum dapat terpetakan perkembangan investasinya.

5.2.4 Perkembangan Investasi Pembangunan Infrastruktur Bersumber dari Swasta dalam 5 Tahun Terakhir

Investasi Pembangunan Infrastruktur Bersumber dari Swasta dalam 5 tahun terakhir belum ada dana yang dialokasikan dari pihak swasta yang terekam secara komprehensif. Dana yang bersumber dari swasta seperti perusahaan pertambangan, perkebunan dan sektor swasta lainnya disalurkan secara langsung oleh pihak terkait.



5.3 PROYEKSI RENCANA INVESTASI BIDANG CIPTA KARYA

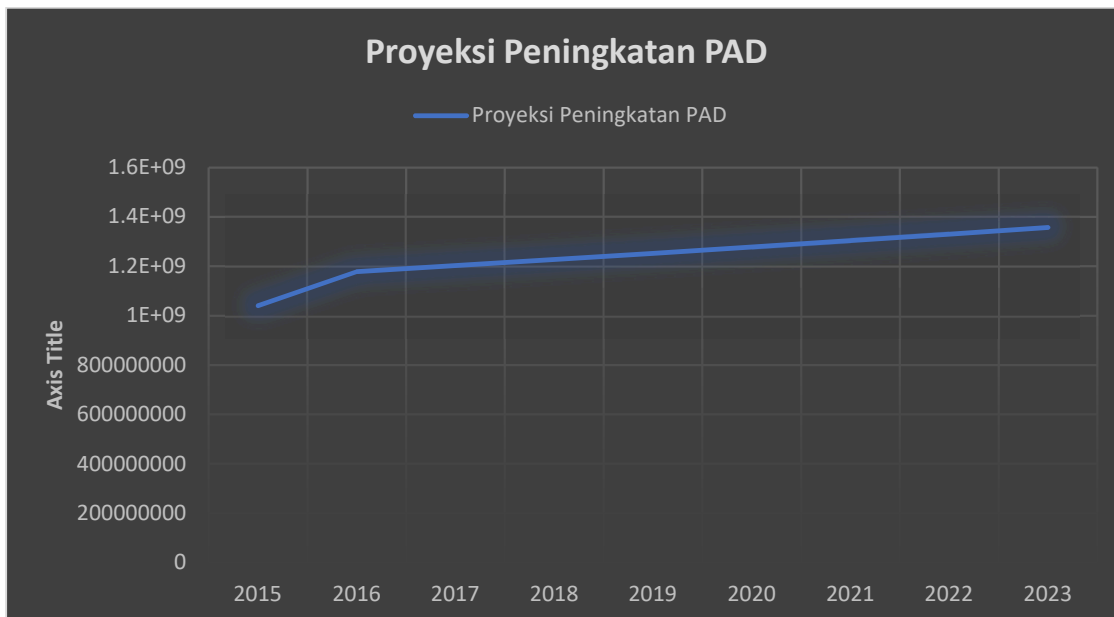
5.3.1 Proyeksi APBD 5 Tahun Ke Depan

Sumber pendapatan terbesar pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2017 berasal dari dana perimbangan sebesar 882 Milyah Rupiah. Sedangkan pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya hanya sebesar 194 Milyar Rupiah. Berikut merupakan tabel proyeksi APBD Kota Palangka Raya

Tabel 5.3 Proyeksi APBD 5 Tahun Ke Depan Kota Palangka Raya

Tahun	PAD
2015	Rp 1,040,448,839
2016	Rp 1,178,481,594
2017	Rp 1,202,983,055
2018	Rp 1,227,484,516
2019	Rp 1,252,485,004
2020	Rp 1,277,994,684
2021	Rp 1,304,023,926
2022	Rp 1,330,583,312
2023	Rp 1,357,683,640

Sumber : Hasil Analisa, 2018



Gambar 5.2 Grafik Peningkatan PAD Kota Palangka Raya

Sumber : Hasil Analisa, 2018



5.3.2 Rencana Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Bidang Cipta Karya

Beberapa rencana kerja sama Pemerintah Kota Palangka Raya dengan pihak Swasta telah diwadahi dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Palangka Raya yang mengamanahkan:

- A. Tujuan umum TJSL adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien. Sementara itu, tujuan khusus TJSL adalah :
 1. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
 2. Terpenuhinya penyelenggaraan TJSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
 3. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSL secara terpadu dan berdaya guna;
 4. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
 5. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
 6. Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi
- B. Program dan bidang kerja TJSL adalah :
 1. Program TJSL dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan bina lingkungan, investasi, sumbangan/donasi, dan promosi.
 2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 3. Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Forum TJSL Kota Palangka Raya.
 4. Bagi perusahaan yang telah melaksanakan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melaporkan hasil dan sasaran pelaksanaan programnya kepada Forum TJSL Kota Palangka Raya secara periodik agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran penerima manfaat TJSL
- C. Bidang Kerja TJSL antara lain :



1. Pendidikan;
2. Kesehatan
3. Infrastruktur;
4. Olah raga dan seni budaya;
5. Sosial dan Keagamaan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Usaha Ekonomi Kerakyatan;
8. Pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
9. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Pembiayaan TJSL meliputi:

1. Pembiayaan pelaksanaan TJSL untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaan pelaksanaan TJSL dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan;
3. Bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
4. Besarnya dana TJSL bagi perusahaan ditentukan oleh forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)



5.4 ANALISIS KETERPADUAN STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA

5.4.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

A. RASIO KEMANDIRIAN DAERAH

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kemampuan keuangan daerah. Rumus yang digunakan dalam mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Kota atau Provinsi menurut Halim (2001:127) adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fispol UGM, 1991

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat



ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010 : 142):

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan APBD Tanpa Subsidi}}$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel berikut ini:

Tabel 5.5 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fispol UGM, 1991

Rasio Desentralisasi Fiskal, Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan rasio desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut :



Tabel 5.6 Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fispol UGM, 1991

B. KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

1. RASIO KEMANDIRIAN DAERAH

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.7 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Keterangan
2013	Rp48,253,701.00	Rp552,429,540.00	8.73	Sedang
2014	Rp87,999,791.00	Rp689,110,638.00	12.77	Kurang
2015	Rp110,999,791.00	Rp708,190,504.00	15.67	Kurang
2016	Rp130,029,316.00	Rp826,834,377.00	15.73	Kurang
2017	Rp194,035,762.00	Rp882,260,364.00	21.99	Kurang
Rata-Rata			14.98	

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Tabel diatas menunjukkan rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya selama periode tahun anggaran 2013-2017 adalah sebesar 14,98 sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah kurang. hal ini menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya selama periode tahun anggaran 2013-2017 memiliki ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan, dan jika dihubungkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kota Palangka Raya masuk dalam



kategori pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

Rasio kemandirian yang masih rendah menunjukkan bahwa pada sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya PAD yang dapat digali oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam pemungutan berdasarkan undang-undang/persyaratan pemerintah dan daerah hanya menjalankan serta menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasilpajak/bukan pajak, DAU, DAK dan bantuan propinsi. Inisiatif, kreatifitas dan kemauan daerah sangat diperlukan dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari jalan yang dapat

memungkinkan mengatasi kekurangan pembiayaannya, hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber

pendanaan dalam program peningkatan PAD.

2. RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH

Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Tabel 5.8 Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer	Total PAD tanpa subsidi	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2013	Rp552,429,540.00	Rp79,754,399.00	692.66	Sangat Tinggi
2014	Rp689,110,638.00	Rp277,440,677.00	248.38	Sangat Tinggi
2015	Rp708,190,504.00	Rp332,258,335.00	213.14	Sangat Tinggi
2016	Rp826,834,377.00	Rp351,647,217.00	235.13	Sangat Tinggi
2017	Rp882,260,364.00	Rp320,722,691.00	275.09	Sangat Tinggi
Rata-Rata			332.88	

Sumber : Analisis, 2018

Tabel diatas menunjukkan rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Palangka Raya selama periode tahun anggaran 2013-2017 adalah sangat tinggi (>50). Hal ini dikarenakan pada tahun 2013-2017 penerimaan dana perimbangan mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Hal ini



menggambarkan bahwa ketergantungan pemerintah Kota Palangka Raya terhadap bantuan pemerintah pusat sangat tinggi.

3. RASIO DESENTRALISASI FISKAL

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, tingkat desentralisasi fiskal diukur melalui rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

Rasio desentralisasi fiskal juga merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) di kali 100% (seratus persen). Secara umum, semakin tinggi Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin tinggi tingkat Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dan sebaliknya, semakin rendah Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin rendah Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Tabel 5.9 Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total PAD	Rasio Fiskal	Desentralisasi	Keterangan
2013	Rp48,253,701.00	Rp632,183,939.00	7.63		Kurang
2014	Rp87,999,791.00	Rp966,551,315.00	9.10		Kurang
2105	Rp110,999,791.00	Rp1,040,448,839.00	10.67		Kurang
2016	Rp130,029,316.00	Rp1,178,481,594.00	11.03		Kurang
2017	Rp194,035,762.00	Rp1,202,983,055.00	16.13		Kurang
Rata-Rata			10.91		

Sumber : Analisis, 2018

Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal menunjukan bahwa tingkat kemampuan daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan otonomi daerah selama tahun 2013-2017 masih kurang. hal ini ditunjukkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang masih kurang karena hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10.91% dari total pendapatan daerah.



5.5 ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Pemerintah selalu berupaya melakukan percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPIJM. Namun, seiring dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBN dan APBD, pemerintah membutuhkan alternatif sumber pendanaan yang potensial. Salah satu alternatif yang potensial adalah optimalisasi alternatif sumber pendanaan dari perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Peran serta dunia usaha dan juga masyarakat untuk pembangunan di daerah-daerah, sangatlah diharapkan. Dengan adanya dukungan dari dunia usaha dan masyarakat, maka peningkatan rasa tanggungjawab dalam hal kepemilikan, operasional dan pemeliharaan paska konstruksi akan terwujud. Dalam menyusun strategi kerja sama pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dan program CSR, penting untuk memahami situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Dengan demikian, keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan efektif dan efisien. Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pemda provinsi/kabupaten/ kota) maupun perusahaan pelaku CSR, memiliki pemahaman dan praktek yang berbeda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya. Secara teknis, pemerintah ditingkat kabupaten/kota telah memiliki rencana pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya yang tertuang dalam dokumen RPIJM, sedangkan perusahaan umumnya memiliki rencana program pada skala desa, dengan spesifikasi teknis yang lebih sederhana.

Tidak semua pemerintah daerah bisa menggandeng perusahaan untuk membangun infrastruktur bidang Cipta Karya, karena umumnya perusahaan hanya melakukan CSR di sekitar wilayah operasional, disamping itu, tidak semua perusahaan memiliki program CSR di bidang infrastruktur ke-CiptaKaryaan. Dalam menjalankan program CSRnya, perusahaan mengacu pada ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility* yang merupakan standar internasional yang berisi panduan mengenai tanggung jawab sosial. Berdasarkan ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*, aspek CSR tidak hanya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, namun juga meliputi aspek tata kelola yang baik, hak asasi manusia, lingkungan hidup, isu konsumen, isu ketenagakerjaan, dan fair operating practices.



5.6 STRATEGI PENDANAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

Dalam rangka percepatan pembangunan bidang Cipta Karya di daerah dan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam melaksanakan usulan program yang ada dalam RPI2JM, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun suatu set strategi untuk meningkatkan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur permukiman. Oleh karena itu pada bagian ini, Satgas RPI2JM daerah agar merumuskan strategi peningkatan investasi pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya, yang meliputi beberapa aspek antara lain:

1. Strategi peningkatan DDUB oleh kabupaten dan provinsi; yaitu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ada sebagai pendamping bantuan dari APBN dalam investasi di bidang cipta karya di daerah.
2. Strategi peningkatan penerimaan daerah dan efisiensi penggunaan anggaran; dalam hal ini adalah dengan menggali potensi daerah dalam penerimaan asli daerah ataupun penerimaan yang sah lainnya dan memperketat pengawasan penggunaan dana anggaran
4. Strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan bidang Cipta Karya;
5. Strategi pendanaan untuk operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastrukturpermukiman yang sudah ada;
6. Strategi pengembangan infrastruktur skala regional.

Dalam upaya peningkatan investasi Bidang Cipta Karya di Kota Palangka Raya adalah dengan melihat potensi keuangan yang ada maka diupayakan dengan menggunakan sumber-sumber dana yang ada, antara lain :

1. APBN
2. APBD Provinsi Kalimantan Tengah
3. APBD Kota Palangka Raya
4. Pinjaman Perbankan
5. Pinjaman melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
6. Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada di Kota Palangka Raya seperti Perbankan, Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pertambangan Baru Bara.



7. Dana Hibah
8. Dan Lain-Lain